

**UANG DAN HAL - HAL LAIN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA
(PILKADES) TAHUN 2017**

(Studi Kasus di Desa Bungo Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)

Femila Rizky Damayanti¹, Wijayanto², Puji Astuti³

Email: rizkyfemila@gmail.com , wijayanto@live.undip.ac.id ,

astutipuji4@gmail.com

Mahasiswa Prodi S1 Ilmu Pemerintahan, FISIP UNDIP

Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP

Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP

Jl. Prof. Soedarto, SH, Kampus Undip Tembalang, Semarang, Indonesia

Abstract

The election of the village headman is a representation of electoral democracy that is closely related to the real life of the community. Voters are relatively more acquainted with and know the candidates who competed in this election compared to candidates at other higher level elections because they live in the same environment. This condition makes voter behavior at the village headman election interesting to study.

This research aims to examine voter behavior and the phenomenon of money politics at the Bungo Village Headman Election in Demak Regency in 2017. Through a series of interviews and documentation, the researcher tries to present an analysis

of the factors that influence the Bungo Village community in determining their choice in the Bungo Village Headman Election, Demak Regency 2017.

This research confirms that there are several factors that influence the community in choosing candidates for village heads such as, these factors include; money politics factors, sociological factors, psychological factors, and rational choice factors.

Keywords: *Village headman election, voter behavior, money politics*

Pendahuluan

Pemilihan kepala desa atau yang biasa dikenal dengan istilah Pilkades merupakan proses pemilihan pemimpin dalam skala kecil (desa) namun sarat dengan dinamika. Hal ini dikarenakan antara pemilih dan kandidat yang akan dipilih relatif tinggal di lingkungan yang sama sehingga pemilih dapat menilai kualitas kandidat bahkan sebelum kampanye kandidat dilakukan.

Pemilihan kepala desa dilaksanakan demi menjaga dan mewujudkan sistem demokrasi dengan sebaik-baiknya dalam penataan pemerintah kedepannya supaya menciptakan kemakmuran untuk masyarakat secara umum sebagaimana landasan yang diterapkan dalam

berdemokrasi. Sebagai landasan pokok pikiran aturan dari pemerintah desa yaitu keberagaman, kontribusi, otonomi, demokratisasi serta memberdayakan warga desa (Sugiman, 2018).

Merujuk pada Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa pemilihan kepala desa ini merupakan agenda untuk memilih pemimpin desa yang diselenggarakan setiap enam tahun sekali. Desa Bungo Kabupaten Demak sendiri menyelenggarakan pemilihan kepala desa untuk terakhir kalinya pada 1 Oktober tahun 2017 silam. Pemilihan kepala desa serupa juga dilakukan di desa-desa lain secara serentak, tidak kurang dari 54 desa di

wilayah Kabupaten Demak layaknya pemilihan kepala daerah.

Kepala desa dalam jabatannya dimaksudkan untuk menyelenggarakan pemerintahan desa bersama lembaga-lembaga desa lainnya seperti Badan Permusyawaratan Desa dan LKMD guna kemajuan dan kesejahteraan wilayah yang dipimpinnya. Tidak jarang kepala desa juga harus memikul tanggungjawab sepenuhnya atas penyelenggaraan pemerintahan desa (Kartohadikoesoemo, 1984).

Pada dasarnya desa memiliki landasan yuridis yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Bahkan ada sebagian yang beranggapan bahwa praktik demokrasi yang kental dapat dilihat di desa karena Kepala Desa dipilih langsung dan bertanggungjawab langsung kepada rakyat yang dipimpinnya. Selain itu juga karena terdapat pembagian yang jelas yaitu pemerintahan desa meliputi Kepala Desa beserta perangkatnya, Badan Perwakilan Desa atau parlemen desa, sehingga terdapat suatu pemisahan

fungsi eksekutif dan legislatif (Dwipayana, 2003).

Tahapan memilih kepala desa pada di era otonomi daerah diimplementasikan dalam bentuk pemilihan elektoral dan didasarkan pada struktur dan kultur warga desa yang saling berinteraksi pada aspek secara teknis serta substansi dan saling menarik kepentingan tiap-tiap perangkat desa. Oleh sebab itu pemilihan kepala desa tidak bisa dilihat dari sudut pandang pemilihan pemimpin saja (Muis, 2006).

Metode

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif untuk memberikan gambaran suatu objek dan memperoleh data yang faktual yang berkaitan dengan variabel penelitian. Penelitian deskriptif lebih kepada keaslian tidak bertolak dari teori melainkan dari fakta dan kenyataan yang benar-benar terjadi dilapangan. Penelitian ini dilaksanakan pada di selenggarakannya Pemilihan Kepala Desa yaitu di Desa Bungo, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak. Adapun subjek/narasumber yang akan

membantu peneliti untuk menggali informasi adalah masyarakat dan pihak yang terkait dalam politik uang. Sumber data diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Metode wawancara ini proses komunikasi untuk memperoleh dan mengumpulkan data dan informasi dengan cara tanya jawab dengan informan yang sedang diwawancarai.

Politik Uang

Saat ini fenomena politik uang bukanlah rahasia lagi, jamak diketahui bahwa kandidat memberikan barang atau uang kepada masyarakat sebagai pemilih (*voters*). Politik uang menjadi budaya yang tidak dapat dipisahkan pada saat kampanye, uang dibagikan kepada masyarakat untuk mempengaruhinya dalam memberikan suara kepada kandidat tersebut.

Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 menempatkan desa layaknya daerah otonom lainnya seperti kota/kabupaten atau provinsi dimana pemilihan pemimpin dilakukan secara demokrasi lewat proses

elektoral. Sehingga pemilihan kepala desa tetap melewati proses kandidasi, penentuan jumlah daftar pemilih, pemungutan suara, dan penghitungan suara.

Perbedaan mencolok pemilihan kepala desa dengan pemilihan elektoral lainnya terletak pada proses kandidasi dimana kandidat mencalonkan diri atas nama individu atau minimalnya atas nama dusun tempat dimana Ia tinggal, bukan diusung oleh partai politik. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan jika masing-masing kandidat memiliki kedekatan dengan partai politik tertentu.

Gegap gempita pemilihan kepala desa juga dapat dilihat pada masa kampanye. Para kandidat mengemukakan gagasan tentang visi dan misi jika terpilih menjadi kepala desa layaknya calon kepala daerah yang disokong oleh partai politik. Pengerahan massa dan penggunaan alat peraga kampanye (APK) tidak jarang menandingi kampanye pada gelaran Pemilihan Bupati atau Walikota. Hal ini menunjukkan betapa

kampanye menjadi bagian yang penting dalam proses pemilihan kepala desa (Zerunisa, 2014)

Walaupun dalam lingkup yang kecil proses pemilihan kepala desa tidak lepas dari praktik *money politics* atau sering kali dikenal dengan politik uang. Menurut Ismawan (1999) hampir pada saat pemilihan baik dari tingkat pemilihan kepala desa hingga pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota legislatif, bahkan pemilihan presiden menggunakan uang, sebagian uang sebagai strategi untuk mempengaruhi masyarakat agar sesuai dengan tujuannya.

Pemberian dalam bentuk uang atau barang digunakan untuk meyakinkan pemilih agar memilih kandidat pemberi uang tersebut. Upaya untuk memperoleh kekuasaan dengan menjadikan uang sebagai perantara memanglah memiliki kekuatan tersendiri dan terbukti mampu meningkatkan perolehan suara (Rini & Setyowati, 2014).

Perilaku politik uang mampu menghasilkan suatu peristiwa patronase dan klientelisme.

Klientelisme merupakan penukaran yang bersifat individual bercirikan terdapat kewajiban maupun interaksi kekuasaan yang dialami disertai ketidakseimbangan diantaranya. Di samping hal tersebut, bersamaan oleh tanda-tanda kegiatan patron yang mempersiapkan klien untuk mengakses berbagai fasilitas. Dengan demikian dibentuklah pola interaksi tukar-menukar yang bersifat timbal balik dan membawa keuntungan satu sama lain (Aspinall & Sukmajati, 2015).

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 pasal 73 ayat (1) tahun 2015 yaitu calon dan/ atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. Namun praktik politik uang sudah menjadi hal yang lazim di tengah masyarakat sehingga hal tersebut justru seringkali dianggap sesuatu yang lumrah. Praktik inilah yang kemudian menjadikan setiap proses elektoral menjadi mahal.

Perilaku Pemilih

Perilaku pemilih ialah sejumlah tingkah laku dari pihak yang memilih (voters) dalam mengambil peran esensial dalam menentukan pilihan saat pemilihan umum. Perilaku memilih ini juga merujuk pada landasan-landasan atau faktor-faktor yang mendorong seseorang tersebut dalam menentukan pilihannya (Schroder, 2009).

Dalam analisis perilaku pemilih terdapat tiga model pendekatan perilaku yaitu pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis sosial dan pendekatan rasional.

1. Pendekatan sosiologis

Model pendekatan sosiologis cenderung menempatkan kegiatan memilih dalam konteks sosial. Kongretnya, pilihan seseorang dalam memilih pada pemilihan umum dapat dipengaruhi dari latar belakang demografi dan sosial ekonomi seseorang seperti jenis kelamin, pendidikan, tempat tinggal (kota-des),

pekerjaan, pendapatan, kelas dan agama (Surbakti, 2003, hal. 145).

Pendekatan ini dapat dilihat melalui status sosial ekonomi, agama, etnik dan tempat tinggal. Hal ini dikarenakan masyarakat atau pemilih cenderung memilih seseorang yang mempunyai latar belakang sosial ekonomi yang tinggi.

2. Pendekatan psikologis sosial

Pendekatan psikologis sosial digunakan dan dikembangkan untuk menjelaskan perilaku pemilih atas keyakinan bahwa pilihan mereka membantu memperbaiki keadaan. Pendekatan ini juga merupakan psikologis dalam diri sendiri akibat proses sosialisasi politik menyangkut orientasi identifikasi partai, isu dan kandidat (Fahmi, 2019).

3. Pendekatan rasional

Pendekatan rasional memandang aktivitas pemilihan menjadi suatu produk kalkulasi yang memiliki keuntungan dan kerugian disertai pertimbangan bukan sekadar biaya pemilihan maupun memungkinkan suara memberikan pengaruh terhadap hasilnya, namun turut terdapat opsi yang berbeda ada dalam pilihan tersebut. Perihal ini dipergunakan pemilih kandidat yang berkeinginan untuk mengajukan diri agar dipilih menjadi pejabat pemerintahan. Untuk seseorang yang memilih mempertimbangkan keuntungan dan kerugian, dipergunakan dalam pengambilan keputusan tentang partai ataupun kandidat yang menjadi pilihan khususnya dalam pembuatan keputusan jika turut serta menentukan pilihan ataupun tidak memilih.

Dalam pilihan rasional, warga negara berperilaku dengan rasional. Yaitu dengan menghitung bagaimana ia mendapatkan hasil terbesar dengan biaya paling murah. Jika warga negara ingin mendapatkan hasil yang sama dalam pemilihan umum, terlepas dari berpartisipasi ikut atau tidaknya dalam pemilihan umum, maka warga negara tersebut tidak harus ikut berpartisipasi pemilu. Dalam perspektif pilihan rasional atau ekonomi hasil dalam pemilihan umum tanpa perlu keluar ongkos (Mujani, Liddle, & Ambardi, 2007)

Berdasarkan uraian diatas menarik kiranya untuk mendalami fenomena politik uang berikut perilaku pemilih dalam pemilihan kepala desa. Penelitian ini berusaha menelaah dan mengkaji lebih lanjut sejauh mana fenomena politik uang dalam gelaran Pemilihan Kepala Desa Bungo Kabupaten Demak tahun 2017 dan

berikut perilaku pemilih dalam gelaran pemilihan kepala desa tersebut

Pemilihan Kepala Desa Bungo 2017 dalam Pusaran Politik Uang

Pemilihan Kepala Desa Bungo tahun 2017 menjadi contoh riil dimana proses elektoral di tingkat desa membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Pada gelaran pemilihan kepala desa tersebut terdapat empat kandidat yang semuanya mengaku mengeluarkan banyak uang untuk membiayai pencalonannya.

**Tabel 1
Nama Kandidat Dan Biaya
Pencalonan Kepala Desa**

No.	Nama kandidat	Biaya yang dikeluarkan
1.	Imam Wahyudi S.E	Rp. 600.000.000,-
2.	Zakaria Hidayat	Rp. 400.000.000,-
3.	BJ Nugroho. S.Sos., MM	Rp. 100.000.000,-

4.	Slamet S.Sos.I	Rp. 900.000.000,-
----	----------------	-------------------

Tindakan yang diambil masing-masing kandidat untuk “berinvestasi” ratusan juta dalam pemilihan kepala desa mungkin terdengar janggal, namun apabila mengetahui latar belakang Desa Bungo maka tindakan tersebut cukup masuk akal bagi mereka yang menginginkan lebih dari sekedar jabatan. Mencalonkan diri menjadi kepala desa tidak lagi dilihat sebagai pengabdian semata, namun juga dilihat sebagai bentuk investasi jangka panjang. Oleh karena itu uang yang digelontorkan dalam pemilihan kepala desa ibarat mahar untuk lelang sebuah jabatan.

Desa Bungo adalah desa yang dengan luas wilayah kurang lebih 795,8 Ha yang terdiri dari area pemukiman, sawah , lahan pertanian lainnya. Luas areal sawah dan lahan pertanian di Desa Bungo sendiri lebih luas daripada dengan areal permukiman. Bahkan Desa Bungo dapat dikatakan sebagai desa yang kaya akan *tanah bondo deso* (tanah

milik desa) meliputi bengkok (tanah sawah) secara keseluruhan sekitar 215 bahu. Kepala desa beserta perangkat desa terpilih berhak atas kesempatan mengelola bengkok tersebut selama menjadi kepala desa dan perangkatnya sampai jabatannya selesai. Secara khusus Kepala Desa mendapat bagian 25 bahu untuk dipinjamkan dan dikelolanya secara pribadi. Investasi ratusan juta menjadi kecil nilainya manakala digantikan dengan sebidang tanah yang luas dan subur selama enam tahun berturut-turut.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Bungo tahun 2017, jumlah warga yang tercatat sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) yaitu sebanyak 4.910 warga/pemilih. Dari seluruh Daftar Pemilih Tetap tersebut 4.367 diantaranya menggunakan hak pilihnya dengan mengikuti pemungutan suara dengan total suara sah sebanyak 4.279 suara. Adapun 543 DPT lainnya tidak hadir dalam pemungutan suara.

Tabel 2
Hasil Pemilihan Kepala Desa Bungo
Tahun 2017

No	Nama Kandidat	Jumlah Suara Sah	Prese ntase
1.	Imam Wahyudi, S.E	1.342	32%
2.	Zakaria Hidayat	943	22%
3.	BJ Nugroho, S.Sos.MM	374	8%
4.	Slamet, S.Sos.I	1.620	38%
Total		4.279	100%

Sumber: Data Pemilihan Kepala Desa Bungo Tahun 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa banyaknya uang yang digunakan berbanding lurus dengan hasil perolehan suara. Fenomena ini diaminkan pula oleh masyarakat Desa Bungo bahwa pemilihan kepala desa bisa dipastikan identik dengan politik uang. Tanpa uang maka mustahil bagi kandidat untuk memenangkan pemilihan kepala desa.

“Kebanyakan di Desa Bungo selama ini memenag untuk jabatan Kepala Desa selalau yang menang adalah uang” (Ahmad Maki, 50

Tahun, wawancara pada tanggal 27 Oktober 2021)

“Menggunakan uang, karena semua kandidat itu pasti menggunakan uang kalau tidak menggunakan uang maka tidak jadi” (Slamet Urip ,54

Tahun, wawancara pada tanggal 28 Oktober 2021)

Pengaruh uang memanglah sangat terasa bagi masyarakat pedesaan yang umumnya hidup dalam kondisi ekonomi menengah kebawah. Menurut penuturan lainnya masing-masing tim sukses secara langsung turun kerumah-rumah masyarakat untuk membagikan uang dan meminta agar dia memberikan hak pilihnya untuk calon yang memberikan uang.

Bahkan secara gamblang terdapat masyarakat yang menyebutkan nominal uang pemberian masing-masing kandidat.

“Jumlahnya beda mba, yang nomor 3 dapat 50.000 yang nomor 4 itu 100.000, jadi jumlahnya beda tergantung calon yang punya duit banyak. (Muspiatun,47 **Tahun, wawancara pada tanggal 31 Mei 2021).**

Pengaruh Politik Uang Terhadap Perilaku Pemilih Pada Pemilihan Kepala Desa Bungo 2017

Keikutsertaan masyarakat Desa Bungo pada pemilihan kepala desa melibatkan tindakan dalam membuat keputusan untuk memilih atau tidak memilih kandidat. Masyarakat Desa Bungo sendiri banyak yang tidak mwngrtahui tentang politik uang karena kurangnya pengetahuan dan sosialisasi politik uang dalam pemilihan kepala desa. Sehingga secara mengakibatkan masyarakat untuk mengabaikan boleh atau tidaknya praktik tersebut.

Meskipun demikian praktik ini sangat mempengaruhi masyarakat dalam perilaku memilih pada saat

Pemilihan Kepala Desa Bungo Tahun 2017.

“Tidak tahu mbak, saya tahunya malah boleh karena sudah dari Tahun ke tahun ada serangan fajar terus tapi ya tidak terjadi apa-apa tapi kalau ada hukumnya kok masih berani melakukan serangan fajar ya mbak, berani banget”
(Muspiatun, 47 Tahun, wawancara pada tanggal 31 Mei 2021).

Menurut pendapat dari Nassmacher dalam Abisono (2012) “uang memperkuat pengaruh politik bagi mereka yang memilikinya atau mereka yang memiliki wewenang untuk mendistribusikannya”. Hal ini uang sebagai alat politik untuk mempengaruhi pemilih agar bisa meraih kemenangan dalam Pemilihan Kepala Desa Bungo. Jika masyarakat tidak diberikan uang untuk memilih maka ia tidak akan menggunakan hak

pilihnya untuk memilih kandidat tersebut.

Akan tetapi tidak semua masyarakat Desa Bungo berpandangan demikian, ada pula diantara mereka yang kemudian mempertimbangkan aspek lain dalam menentukan pilihannya.

“Ya saya lihat lihat calonnya dulu, kalau tidak sesuai sama saya ya saya tidak mencoblos. Karena saya pilih no 4 tadi itu masih ada hubungan keluarga dan beliau adalah seorang guru dan juga imam di mushola Bungo”. **(Muzazin, 37 Tahun, wawancara pada 3 Juni 2021).**

Diantara masyarakat tersebut ada pula yang melihat dari sisi *track record* kandidat. Pilihan ini merujuk pada salah satu kandidat yang memang sebelumnya pernah menduduki jabatan legislatif.

“Tidak memiliki hubungan apa-apa, alasan saya memilih ya tadi ramah, sopan dan waktu itu pernah kepilih menjadi DPR mungkin cara kerjanya bagus.” (Abdul H, 56 Tahun, wawancara tanggal 28 Mei 2021).

Kesimpulan

Pemilihan Kepala Desa Bungo Kabupaten Demak tahun 2017 masih sarat dengan politik uang. Hal ini ditegaskan kembali oleh masyarakat selaku pemilih (*voters*). Banyak diantara masyarakat yang menganggap pemberian uang menjelang pemilihan kepala desa merupakan hal yang lumrah.

Praktik tersebut terbukti mampu mendongkrak perolehan suara salah kandidat. Jumlah uang yang dikeluarkan oleh kandidat dalam pemilihan kepala desa tersebut

berbanding lurus dengan perolehan suara yang didapat.

Meskipun demikian tidak semua masyarakat Desa Bungo memilih kandidat berdasarkan uang saja, ada diantara mereka yang menuntukan pilihannya berdasarkan pertimbangan lain baik secara sosiologis maupun psikologis maupun atas dasar *track record* kandidat.

Referensi *Buku dan Jurnal*

- Abisono, F. (2012). Money in Political Contestation: An Ethnographic Study in Monet Politics Practise in Yogyakarta's Local Election 2011. Yogyakarta: Tesis, Universitas Gadjah Mada.
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2015). Politik Uang Di Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Polgov.
- Dwipayana, A. (2003). Membangun Good Goovernance di Desa. Yogyakarta: IRE Press.
- Fahmi, M. H. (2019). Perilaku Pemilih Masyarakat Kabupaten Pada Pilpres 2019. Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Univrab Volume 1, Nomor 1.
- Ismawan, I. (1999). Money Politics Pengaruh Uang dalam Pemilu. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Kartohadikoesoemo, S. (1984). Desa. Yogyakarta: PN Balai Pustaka.
- Muis, A. (2006). Pemilihan kepala desa sebagai acuan empiris pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung (ditinjau dari perspektif historis). Jurnal Desentralisasi Volume 7, Nomor 4 , 15-34.
- Mujani, S., Liddle, R. W., & Ambardi, K. (2007). Kuasa Rakyat: Analisis Tentang Perilaku Memilih Dalam Pemilihan Legislatif Dan Presiden Indonesia Pasca Orde. Yogyakarta: Mizan Media Utama.
- Muspiatun. (2021, Mei 31). (F. R. Damayanti, Interviewer)
- Rini, I. S., & Setyowati , R. N. (2014). Makna Money Politics Pada Masyarakat Kelas Bawah Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan. Kajian Moral dan Kewarganegaraan Nomor 2 Volume 1, 109-126.
- Schroder, P. (2009). Strategi Politik. Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung .
- Sugiman. (2018). Pemerintahan Desa . Binamulia Hukum Volume 7 Nomor 1.

Surbakti, R. (2003). Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Grasindo.

Zerunisa, R. (2014). Political Marketing Kandidat Dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). (Studi Kasus Pilkades Desa Gentan Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten). Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. Retrieved from <http://eprints.uny.ac.id/22295/9/9%20RINGKASAN.pdf>

Wawancara

H, Abdul. (2021, Mei 28). (F. R. Damayanti, Interviewer)

Maki, A. (2021, Oktober 27). 50 tahun. (F. R. Damayanti, Interviewer)

Muazzin. (2021, Juni 3). (F. R. Damayanti, Interviewer)

Urip, S. (2021, Oktober 28). (F. R. Damayanti, Interviewer)